BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pencairan gaji di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung dimulai dari pengajuan pembuatan daftar gaji dari bendahara Polrestabes Bandung dengan diajukan ke Kapolres untuk di cek sesuai daftar gaji yang telah ditentukan, setelah disetujui lalu di tandatangani oleh Kapolres dan proses selanjutnya Kapolres mengajukan slip daftar gaji anggota POLRI ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) untuk segera diproses dan dikembalikan kepada Sikeu Polrestabes Bandung untuk dibayarkan langsung ke rekening anggota POLRI.
2. Hambatan dalam pelaksanaan prosedur pencairan gaji di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung yaitu berkurangnya anggaran gaji dalam satu tahun yang disebabkan oleh mutasi anggota POLRI karena perintah, kenaikan gaji berkala dan bertambahnya tunjangan bagi anggota POLRI yang menikah sehingga anggaran gaji dalam 1 (satu) tahun tidak mencapai target.
3. Upaya yang dilakukan dalam terjadinya hambatan dalam pelaksanaan prosedur pencairan gaji di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung dalam kekurangan anggaran gaji yaitu dengan cara membuat surat penambahan anggaran/revisi untuk Dirjen dan diberikan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) dibawah Kementrian Keuangan untuk sesegera mungkin diproses agar anggaran gaji mencakup untuk semua anggota POLRI. Selain itu saat proses persetujuan KPPN, bagian keuangan Polrestabes Bandung meminta bantuan ke satuan Wilayah lebih atas yaitu bagian keuangan Polda Jabar untuk dapat

menanggulangi kekurangan anggaran pada masa persetujuan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, maka saran yang dibuat oleh penulis yaitu apabila terjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan prosedu r pencairan gaji sebaiknya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung melalui Sikeu harus memiliki dana pembukuan anggaran gaji untuk anggota POLRI yang dimutasi. Apabila terjadi masalah kekurangan anggaran gaji di Polrestabes Bandung, maka bagian keuangan Polda Jabar harus menanggulangi kekurangan anggaran dengan persetujuan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).